

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Demokrasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu sistem pemerintahan yang paling tua. Sistem demokrasi diperkenalkan pertama kali dalam kehidupan politik di Athena, Yunani. Demokrasi dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik di mana rakyat sendiri yang memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Istilah demokrasi ini berasal dari kata ‘demos’ yang berarti rakyat dan kata ‘cratein’ atau ‘cratos’ yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Secara leksikal, demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang prinsip kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>1</sup> Demokrasi dalam paradigma Yunani memiliki tujuan politik yang menciptakan kesetaraan politik semua warga negara, kemerdekaan, rasa hormat pada hukum dan keadilan. Demokrasi memberikan mandat kepada *demos* untuk memerintah dirinya sendiri (*self-government*). Keutamaan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat menjadi orientasi utama dalam suatu tata pemerintahan.

Namun, perlu diketahui bahwa sistem demokrasi dalam sebuah pemerintahan bukanlah suatu sistem pemerintahan yang sangat ideal. Sistem demokrasi hanya sebuah pilihan minus-malum dari beberapa sistem pemerintahan seperti otokrasi, timokrasi, aristokrasi, monarki, dan tirani, yang secara prinsipil bentuk-bentuk pemerintahan itu

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 1

justru bercorak eksklusif dan sangat berorientasi pada kesejahteraan pribadi (*bonum privatum*), kelompok atau golongan tertentu. Hal ini sebenarnya hendak menegaskan bahwa demokrasi juga memiliki catatan-catatan minus. Filsafat politik semenjak Plato telah membuat pernyataan afirmatif bahwa demokrasi adalah suatu rezim *epitumia*<sup>2</sup> yaitu rezim pemerintahan yang prinsipnya adalah kebebasan untuk memenuhi hasrat masing-masing individu dengan menegasi upaya *bonum commune*.

Sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang banyak diterapkan, aktualitas demokrasi justru cenderung mempresentasikan model demokrasi yang berkarakter oligarkis dan aristokratis.<sup>3</sup> Kekuasaan rakyat yang dipercayakan kepada para oligark tersebut direduksi demi kepentingan diri sendiri. Dengan demikian tepatlah penegasan dari Jacques Rancière dalam karyanya '*Hatred of Democracy*' (2005), bahwa demokrasi selalu merepresentasikan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan nafsu yang tidak terpuaskan dari para oligark.<sup>4</sup> Dimulai dari Yunani, demokrasi sudah sangat eksklusif atau yang bekerja dengan logika pengecualian. Demokrasi bukan sekadar geografi ide melainkan juga geografi raga. Artinya secara ragawi ada kelompok yang tidak dianggap sebagai bagian dari tatanan sosial politis. Selalu ada kecenderungan karakter dominasi

---

<sup>2</sup> A. Setyo Wibowo, *Paidea: Filsafat Pendidikan-Politik Platon*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hlm. 20. [*Epitumia* adalah nafsu atas objek yang secara langsung berkaitan dengan tubuh. *Epithumia* sebagai gambaran untuk nafsu di bawah perut yang tak pernah berhenti, tak mau dibatasi, tak terbatas; ia menciptakan peperangan dalam diri individu dan antar individu].

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, dkk., *Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 15.

<sup>4</sup> Jacques Ranciere, *Hatred of Democracy*, dalam Steve Corcorun (terj.), (London: Verso, 2006), hlm. 73. [The evils of which our 'democracies' suffer are primarily evils related to the insatiable appetite of oligarchs].

politis yang sangat bercorak organisasional-struktural dalam bingkai demokrasi.<sup>5</sup> Akibatnya, kesetaraan dalam demokrasi mengalami disorientasi dengan adanya masyarakat dominan dan masyarakat marginal. Tercipta suatu disparitas sosial yang didukung dengan terbentuknya partisi-partisi sosial dalam kehidupan masyarakat yakni kelas sosial dominan dan kelas sosial marginal. Dalam konteks ini, ketidaksetaraan menjadi euforia dalam kehidupan demokrasi. Politik demokrasi tidak mensyaratkan suatu perilaku kesetaraan dari kelompok superior terhadap inferior. Wacana ideal tentang kesetaraan dalam masyarakat sosial hanya menjadi suatu ilusi yang digaungkan tanpa eksekusi praksis. Tatanan sosial demokrasi tidak mensyaratkan suatu prinsip kesetaraan bagi semua orang dan setiap orang. Hal ini dipelintir oleh adanya bentuk dan pola gratifikasi dalam tatanan sosial. Pengkategorian kelompok masyarakat bermuara pada dinamika distingsi sosial. Selalu saja ada kategori masyarakat lemah yaitu mereka yang tidak memiliki kualifikasi menjadi korban ketidaksetaraan dalam politik demokrasi.

Eksistensi kategori masyarakat yang menjadi korban ketidaksetaraan itu sebenarnya tidak menciptakan ruang fatalis bagi mereka, tetapi justru sebaliknya ada gerakan-gerakan sosial untuk menuntut adanya hak kesetaraan mereka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam politik wacana bahwa kelompok-kelompok marginal juga selalu

---

<sup>5</sup> Oktovianus Naif, *Demokrasi Pancasila: Musyawarah-Mufakat*, dalam Mateus Mali (ed.), *Perjumpaan Pancasila dan Kristianitas: Reposisi Relasi Negara dan Agama Masyarakat Plural*, (Yogyakarta: Lamahera, 2009), hlm. 322. [Geografi raga dan geografi ide merupakan dua hal yang menjadi citra dari demokrasi di Athena, Yunani. Geografi ide merujuk pada pembagian tugas berdasarkan kualifikasi kepakaran. Sedangkan geografi raga merujuk pada kelompok yang secara ragawi tidak termasuk dalam lingkaran *demos* seperti anak-anak, perempuan, pedagang asing, para budak baik laki-laki maupun perempuan. Sebab berdasarkan raga, warga *demos* adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki dewasa berkulit putih berusia minimal 18 tahun dan merupakan keturunan asli Athena].

berusaha untuk menghadapi wacana hegemonik yang memosisikannya sebagai bagian yang tidak memiliki bagian dalam tatanan sosial.<sup>6</sup> Kelompok masyarakat marginal dengan segala kualifikasi dirinya akan selalu berusaha untuk menghadapi dan melawan pelbagai bentuk tindakan eliminatif dari kelompok sosial dominan. Mereka dengan segala kebebasan berjuang untuk diakui dan diperlakukan setara. Kehadiran mereka dalam ruang publik adalah sebuah bentuk impetus untuk diakui bahwa mereka juga berhak dan layak untuk diperhitungkan dan dilibatkan dalam setiap urusan sosial-politik, pendidikan dan ekonomi dalam tatanan sosial. Hal ini tentu didasari pada kesadaran kesetaraan.

Diskursus tentang konsep kesetaraan dalam demokrasi telah menjadi tema umum yang terus didiskusikan oleh para ahli maupun filsuf, salah satunya adalah Jacques Rancière. Rancière adalah salah seorang pemikir politik demokrasi kontemporer yang sangat menekankan tentang ide kesetaraan. Gagasan kesetaraan itu dibahas Rancière berkaitan dengan demokrasi. Gagasan kesetaraan itu dibangun dari gagasan kesetaraan bahwa kesetaraan itu pada dasarnya merupakan fakta eksistensi sosial yang tidak dapat direduksi. Gagasan filosofis kesetaraannya dilihat sebagai kesetaraan radikal, dengan prinsipnya adalah kesetaraan pada setiap orang dan semua orang. Konsep kesetaraan radikal itu dijelaskannya dengan beberapa tesis filosofisnya,

---

<sup>6</sup> Gustiana Kambo, *Politik Identitas Etnik: Sebuah Kajian Konstruktivis dalam Tradisi Interaksi Simbolik*, (Makasar: Unhas Press, 2010), hlm. 19.

yaitu tentang “bagian tetapi bukan bagian” (*la part de sans part*), distribusi indrawi (*le partage du sensible*), dan subjektivasi politik (*la subjectivation*).<sup>7</sup>

Rancière mempersoalkan paradigma yang membagi tatanan sosial berdasarkan tempat, fungsi, bakat, garis keturunan, dan kepakaran sebagai kualifikasi-kualifikasi dasar. Berhadapan dengan kondisi tersebut, dalam tatanan sosial terdapat individu-individu yang tidak memiliki dan memenuhi kualifikasi tersebut. Ketiadaan kualifikasi mengakibatkan keberadaan mereka menjadi terancam. Mereka dianggap tidak ada, tidak terhitung, tidak terlihat, jika terlihat pun hanya dikonsepsikan sebagai yang mengganggu tatanan sosial yang telah mapan. Mereka adalah golongan masyarakat yang tidak terkategori dalam tatanan sosial sebab mereka tidak memenuhi dan memiliki kualifikasi-kualifikasi tradisional yang selalu menjadi acuan dalam tatanan sosial. Mereka dianggap sebagai pencipta konflik dalam tatanan sosial yang telah teratur. Kehadiran mereka tidak perlu didengarkan, harus dihindari dan bahkan ditolak. Dinamika politis mereka hanya adalah bagian dari konstruk politik struktural yang selalu mengatasi mereka. Rancière menyebut “orang-orang yang tidak dihitung” itu sebagai ‘*the wrong*’.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> R. Ari Nugroho, *Ranciere dan Subjek Politik '65*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hlm. 15-17. [Tema “bagian tapi bukan bagian” merujuk pada subjek yang tersingkirkan dari sistem sebagai hasil dari skandal demokrasi sebagai praktik polis yang terjadi di masyarakat. Distribusi Indrawi merujuk pada tatanan indrawi dari pemerintahan hukum yang implisit, yang mengelompokkan tempat-tempat dan bentuk-bentuk partisipasi dalam kehidupan bersama di masyarakat. Subjektivasi politik artinya proses di mana subjek politik mengekstraksi dirinya dari kategori-kategori dominan dari identifikasi dan klasifikasi. Tiga tema ini akan dibahas selanjutnya dalam kaitan dengan konsep Rancière tentang kesetaraan radikal demokrasi].

<sup>8</sup> Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, dalam Julie Rose (terj.) (Minneapolis: University Of Minnesota Press, 1999), hlm. 21. [Rancière menyebut “orang-orang tak terhitung” dengan tiga istilah yang pengertiannya agak sulit untuk dibedakan satu

Istilah *'the wrong'* merupakan terjemahan dari berasal dari bahasa Prancis yaitu *'le tort'*, yang dipahami secara etimologis diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "*yang salah*". Perlu diketahui bahwa pengertian term *'yang salah'* ini tidak boleh dipahami dalam arti moral.<sup>9</sup> Ranciere menggunakan istilah *'yang salah'* tersebut sebenarnya untuk menegaskan bahwa tatanan sosial selalu "keliru" dalam perkara hitung-menghitung. Selalu ada yang di luar perhitungan, sehingga apabila "yang tak terhitung" itu muncul, tatanan sosial melihat sebagai yang "keliru dihitung" atau *'yang salah'* dihitung.<sup>10</sup>

Perihal eksistensi *'the wrong'* ini, Ranciere merujuk pada Aristoteles yang mengkategorikan masyarakat dalam demokrasi Athena menjadi dua bagian, yaitu: *pertama*, masyarakat *'sumpheron'*. Kelompok masyarakat *'sumpheron'* merujuk pada mereka yang superior, memiliki kualifikasi-kualifikasi tradisional, selalu mengatur, dan teridentifikasi dalam tatanan sosial. Kategori *'sumpheron'* dipandang sebagai masyarakat *'useful'* bagi perkembangan demokrasi dan politik polis.<sup>11</sup> *Kedua*, masyarakat *'blaberon'*, yaitu mereka yang dianggap berbahaya dalam tatanan sosial; posisinya selalu diatur, tidak memiliki kualifikasi tradisional akibatnya tidak dianggap sebagai bagian dari tatanan sosial, dan mereka diposisikan sebagai korban. Masyarakat *'blaberon'* disebut sebagai yang tidak memiliki bagian dalam hal apapun dalam tatanan

---

sama lain, yaitu: *the wrong*, *demos*, dan *the people*. Dalam karya ini selanjutnya, penulis akan menggunakan istilah *'the wrong'*].

<sup>9</sup> Sri Indiyastutik, *Disensus: Demokrasi Sebagai Perselisihan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2019), hlm. 16.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>11</sup> Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy, Op. Cit.*, hlm. 3.

sosial.<sup>12</sup> Rancière kemudian menyebut mereka sebagai '*la part de sans part*' yaitu bagian yang dianggap bukan bagian atau lebih tepatnya sebagai '*the wrong*'.

*De facto* bahwa realitas politik demokrasi telah mendiskualifikasikan mereka sebagai '*the wrong*' dari tatanan sosial sebab keberadaan mereka dianggap tidak ada dalam kriteria tatanan sosial. Mereka tidak memiliki kualifikasi apa pun yang dapat dijadikan ukuran untuk menjadi bagian dari masyarakat, yaitu berguna dan yang adil dalam tatanan sosial. Hal ini didasarkan pada konsepsi manusia tentang kehidupan bersama, yakni menata dan membagi-bagi di mana selalu ada bagian yang tak perlu dihitung. Rancière menyebut proses pembagian berdasarkan kualifikasi tersebut sebagai suatu proses pembagian berdasarkan persepsi indra atau disebutnya sebagai distribusi indrawi dan itu terjadi dalam tatanan sosial. Rancière menyebut proses distribusi indrawi itu sebagai suatu sistem dari fakta-fakta yang tampak dalam mengungkapkan keadaan atas sesuatu serta batasan-batasan yang menentukan bagian dan posisinya masing-masing.<sup>13</sup>

Tatanan sosial selalu mensyaratkan sebuah kriteria atau fakta-fakta indrawi yang menjadi landasan dan ukuran dalam keterlibatan dalam komunitas sosial masyarakat. Akibatnya, golongan atau kategori masyarakat yang tidak memiliki kriteria atau atribut tradisional seperti kekayaan, kepakaran, keturunan, dan keunggulan moral, harus menjadi objek dan sasaran kelompok yang tidak dianggap dan tidak terhitung (*miss-account*) sebagai bagian dari tatanan komunitas sosial. Mereka itu adalah

---

<sup>12</sup> Oliver Davis, *Key Contemporary Thinkers: Jacques Rancière, Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>13</sup> Jacques Rancière, *The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible*, dalam Gabriel Rockhill (ed. & terj.), (London: Bloomsbury Publishing Plc, 2004), hlm. 7.

seompok orang-orang yang tidak memiliki posisi.<sup>14</sup> Kehadiran mereka hanya dipandang sebagai sesuatu yang salah. Mereka adalah sebuah kesalahan yang selalu tidak diperhitungkan. Rancière menyebut ‘*the wrong*’ itu sebagai ‘bukan bagian yang nyata dari tubuh sosial’.<sup>15</sup>

Rancière kemudian memberi definisi bagi ‘*the wrong*’ sebagai ‘*demos*’. Pengertian ‘*demos*’ berbeda dengan pemahaman umum yang mengartikan ‘*demos*’ sebagai rakyat yang berdaulat. Eksistensi *demos* dipahami dan dijelaskan oleh Rancière sebagai bagian dari orang-orang kebanyakan (*the people*), yang kehadirannya hanya dilihat sebagai pelengkap atau suplemen dalam tatanan sosial.<sup>16</sup> Kontribusi ‘*demos*’ dalam komunitas sosial tidak diperhitungkan sebab ‘*demos*’ itu tidak memiliki kualifikasi-kualifikasi yang sudah ditentukan dalam komunitas itu. Rancière menyebutkan eksistensi ‘*demos*’ itu sebagai bagian dari konstruksi masyarakat yang terdiferensiasi akibat tiadanya kualifikasi yang dimiliki seperti yang telah ditetapkan sebagai sebuah kultur. Rancière mendefinisikan ‘*demos*’ itu sebagai berikut:

“*Demos*’ adalah orang-orang (*people*) yang dipahami sebagai pelengkap bagian dari komunitas - yang saya sebut sebagai hitungan yang tak terhitung. Itu adalah inskripsi tentang sebuah kontingensi yang dapat ada di sini atau di sana, sebagai lawan dari kualifikasi untuk memerintah”.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Hallward, *Staging Equality: Rancière’s Theatrocracy and the Limits of Anarchic Equality*, dalam Gabriel Rockhill & Philip Watts (ed.), *Jacques Rancière: History, Politics, Aesthetics*, (London: Duke University Press, 2009), hlm. 157.

<sup>15</sup> Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy, Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 8. [*The People* merujuk pada kumpulan massa yang tidak dapat dibedakan dari mereka yang tidak memiliki kualifikasi positif, yaitu tidak memiliki kekayaan dan kebajikan. *The People* adalah subjek politik dari demokrasi yang menjadi suplemen di dalam tatanan sosial yang dihitung dan mengambil alih kategori-kategori masyarakat yang telah diidentifikasi].

<sup>17</sup> Jacques Rancière, ‘*The Thinking of Dissensus: Politics and Aesthetics*’, dalam Paul Bowman & Richard Stamp (ed.), *Critical Dissensus: Reading Rancière*, (London: Continuum International Publishing Group, 2011), hlm. 5. [‘The *demos* is the people conceived as a supplement

Eksistensi '*demos*' itu dijelaskan oleh Rancière sebagai salah satu kategori masyarakat yang terkomposisi dalam '*the people*'. Aktualitas '*demos*' akan selalu berhadapan dan bertentangan dengan '*ethnos*', yaitu kategori masyarakat yang diidentikkan dengan tubuh yang hidup dari mereka yang memiliki asal yang sama, lahir di tanah yang sama atau menyembah dewa yang sama.<sup>18</sup> Di hadapan masyarakat '*ethnos*', kelompok masyarakat '*demos*' selalu menjadi bagian yang tak dianggap dan tak dihitung. '*Demos*' bukanlah orang-orang yang tidak punya keahlian, bukan orang-orang yang tengah berkumpul dalam sebuah pertemuan akbar, bukan orang-orang yang tidak tahu seperti anggapan para oligark, bukan kekuatan rakyat yang menjadi penghubung dalam perbincangan mengenai politik. Posisi '*demos*' dalam hal ini adalah sebuah proses diferensiasinya dari '*ethnos*'.<sup>19</sup>

Sekalipun demikian, '*demos*' itu memiliki kemampuan yang bersifat kontingen untuk selalu melawan tatanan sosial yang mengagungkan kualifikasi-kualifikasi identitas. '*Demos*' itu selalu tampil untuk memverifikasi dirinya dalam tatanan yang mengorientasikan segala bentuk kualifikasi untuk memerintah. Dalam artian, '*demos*' itu memiliki kemampuan desakan bagian komunal untuk melawan obsesi tatanan sosial yang mendiskualifikasikan mereka dari komunitas. '*The wrong*' sebagai '*demos*' itu selalu kontingen dalam melakukan verifikasi kesetaraan dirinya dalam tatanan sosial itu. Verifikasi kesetaraan terjadi dengan mengandaikan kesetaraan dan bertitik tolak pada kesetaraan itu sendiri. Artinya tindakan yang dilakukan '*the wrong*' berdasarkan pada

---

to parts of the community – what I call the count of the uncounted. It is the inscription of the mere contingency of being born here or there, as opposed to any qualification for rulling].

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

pemahaman bahwa dirinya setara dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam tatanan dominan tersebut.<sup>20</sup>

Tindakan tersebut oleh Rancière disebut sebagai politik (*la politique*), yaitu upaya kemunculan subjek '*the wrong*' untuk melawan dan menentang aturan-aturan tatanan sosial dengan cara memberi kesempatan bersuara atau bertindak kepada subjek yang dimarginalkan oleh hierarki pengetahuan dalam sebuah komunitas.<sup>21</sup> Aktus politik ini yang disebut Rancière sebagai perjuangan '*the wrong*' sebagai subjek politik dalam proses subjektivasi politik dengan upaya mengklaim status sebagai subjek yang setara dalam tatanan sosial.

Tindakan politik sebagai bentuk proses subjektivasi politik ditegaskan oleh Rancière sebagai manifestasi dari demokrasi disensus. Disensus ini dipahami sebagai bentuk intervensi '*the wrong*' kepada tatanan sosial yang telah memainkan logika distribusi indrawi yang membuat '*the wrong*' tidak terlihat, tidak dianggap. Politik disensus ini menciptakan subjek politik yang memainkan logika ketidaksepakatan sebagai dasar untuk melakukan verifikasi kesetaraan dalam tatanan sosial.<sup>22</sup> Pada titik ini, Rancière mendudukan konsepnya tentang demokrasi. Demokrasi itu dipahami sebagai konsistensi tindakan perselisihan antara orang-orang yang tidak dihitung (*the wrong*) dan tatanan sosial yang selalu luput untuk melihat eksistensi mereka.

---

<sup>20</sup> Sri Indiyastutik, *Dissensus: Demokrasi Sebagai Perselisihan Menurut Jacques Ranciere, Op. Cit.*, hlm. 16.

<sup>21</sup> R. Ari Nugroho, *Ranciere dan Subjek Politik '65, Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>22</sup> Donny Gahral, *Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkrutan Liberalisme*, (Depok: Koekoesan, 2010), hlm. 43.

Ditegaskan lagi bahwa demokrasi itu dipahami sebagai tindakan subjektivasi politik yang mengganggu tatanan sosial dengan mengundang polemik dengan mempertanyakan koordinasi estetika dari persepsi, pemikiran, dan tindakan. Demokrasi adalah upaya subjek untuk memunculkan dirinya menjadi suplemen di antara tatanan dominan melalui pertentangan antara logika kesetaraan dan logika ketidaksetaraan yang terjadi di arena yang politis. Jacques Rancière menegaskan konsep demokrasi dalam salah satu tesis politik bahwa:

“Demokrasi bukanlah sebuah rezim politik. Sebagai suatu perpecahan atau keputusan dalam logika arkhè, yaitu antisipasi kekuasaan dalam disposisinya, rezim politik itu sendiri sebagai sebuah bentuk hubungan yang mendefinisikan subjek tertentu”.<sup>23</sup>

Bagi Rancière, demokrasi bukanlah rezim politik dalam arti yang dapat menciptakan kondisi adanya kemungkinan konstitusi yang menentukan cara-cara di mana orang berkumpul di bawah sebuah otoritas dominan. Demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan dan bukan pula bentuk pengaturan tatanan sosial. Demokrasi ditemukan ketika ‘*the wrong*’ melakukan tindakan politik dengan mengandaikan dan bertitik tolak pada kesetaraan untuk mengganggu tatanan sosial sehingga tatanan tersebut bertransformasi menjadi tatanan baru.<sup>24</sup>

Berdasarkan gagasan filosofis Rancière di atas, penulis tertarik untuk menelusuri dan mengkaji pemikiran Rancière khususnya tentang kesetaraan radikal dan demokrasi lebih komprehensif. Oleh sebab itu, untuk memudahkan penulis dalam menguraikan

---

<sup>23</sup> Jacques Rancière, *Dissensus: On Politics and Aesthetics*, dalam Steven Corcoran (ed. & transltd.), (London: Continuum International Publishing Group, 2010), hlm. 30. [Democracy is not a political regime. As a rupture in the logic of the arkhè, that is, of the anticipation of ruling in its disposition, it is the very regime of politics itself as a form of relationship that defines a specific subject].

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 47-50.

gagasan Jacques Rancière tersebut, penulis merangkum uraian itu di bawah judul: **“DEMOKRASI DAN KESETARAAN RADIKAL MENURUT JACQUES RANCIÈRE”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berusaha mengemukakan beberapa pertanyaan penuntun untuk memahami konsep Jacques Rancière secara komprehensif. Berikut pertanyaan-pertanyaan tersebut, antara lain:

1. Siapa itu Jacques Rancière ?
2. Apa saja hal yang menjadi latar belakang pemikiran Jacques Rancière ?
3. Bagaimana konsep kesetaraan radikal dan demokrasi menurut Jacques Rancière ?
4. Bagaimana relevansi konsep kesetaraan radikal dan demokrasi Jacques Rancière dalam konteks Indonesia ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu penulis bermaksud untuk dan mengkaji secara komprehensif pemikiran Jacques Rancière tentang demokrasi dan kesetaraan radikal. Berikut beberapa tujuan inti yang hendak dicapai dalam penulisan karya ini adalah:

1. Menjelaskan dan menguraikan tentang kehidupan Jacques Rancière, pendidikan dan karya-karyanya.
2. Menjabarkan latar belakang pemikiran Jacques Rancière dengan pendekatan historis-kritis.

3. Menjelaskan dan menjabarkan tentang konsep demokrasi serta menguraikan pemahaman kesetaraan radikal menurut Jacques Rancière.

## **1.4 Kegunaan Penulisan**

### **1.4.1 Akademis**

Karya ini merupakan salah satu kriteria akademis agar dapat menyelesaikan tugas akhir demi mencapai gelar sarjana di Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Selain itu, dengan penelitian ini sebenarnya mau menguji kemampuan penulis dalam mengelaborasi pemikiran filsafat dan mengkontekstualisasikan dengan realitas hidup sosial.

### **1.4.2 Personal**

Kegunaan pertama yang ingin dicapai adalah penulis bisa menjelajahi dan memahami pemikiran politik kesetaraan demokrasi Jacques Rancière secara kritis, analitis, dan komprehensif. Kedua, dengan berbasiskan pemikiran Jacques Rancière ini, penulis terdorong untuk melihat, mengkaji, serta menilai secara akurat dan terlibat dalam situasi politik berdemokrasi saat ini di Indonesia.

### **1.4.3 Institusional**

Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga pendidikan, dalam hal ini Fakultas Filsafat sebagai instansi yang menyelenggarakan proses pendidikan mahasiswa yang berkualitas dan berintegritas secara filosofis-profetis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi mereka semua yang ingin mengetahui dan mendalami pemikiran Jacques Rancière tentang demokrasi sebagai

wadah emansipasi bagi semua kalangan masyarakat, terutama kelompok orang-orang lemah secara ekonomis, politik, dan pendidikan.

#### **1.4.4 Masyarakat Luas**

Dengan penelitian ini, diharapkan agar dapat memberi kontribusi pemikiran bagi seluruh masyarakat untuk menciptakan relasi sosial yang emansipatif terutama dengan kaum terpinggir yang seringkali dieliminasi dari tatanan sosial. Masyarakat luas diajak untuk keluar dari tatanan sosial dominan dan membangun tindakan kesalingan sosial dengan seluruh masyarakat dalam semangat demokrasi.

#### **1.5 Metode Penulisan**

Dalam melakukan penulisan ini, metode penulisan yang digunakan penulis untuk memahami pemikiran Rancière secara objektif adalah metode kepustakaan. Berbagai sumber buku maupun jurnal dikumpulkan dan dielaborasi serta dikonstruksikan, dan diinterpretasi untuk menopang pembacaan penulis terhadap konsep Rancière tentang kesetaraan radikal dan demokrasi secara komprehensif.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar mendapatkan pemahaman yang sistematis, maka penulis membuat klasifikasi ulasan yang terdiri dari lima BAB. Pada BAB I, penulis akan menyajikan ulasan perihal latar belakang dan maksud penulis untuk meneliti dan mendalami konsep Rancière tentang kesetaraan radikal dan demokrasi. Dalam BAB II, penulis akan menjelaskan pula tentang biografi, latar belakang pendidikan, karya-karya, latar belakang pemikiran Rancière dan menjelaskan term-term pokok dalam pemikirannya tentang kesetaraan radikal dan demokrasi. Pada BAB III, penulis akan menguraikan

juga tentang konsep-konsep pokok Rancière dalam mengembangkan gagasannya tersebut. Pada BAB IV, penulis secara teliti akan memaparkan gagasan Rancière tentang kesetaraan radikal dan demokrasi serta karakteristik gagasan tersebut. Sedangkan pada BAB V, penulis akan menunjukkan catatan kritis terhadap gagasan Rancière tersebut serta berusaha untuk mengkontekstualisasikannya dalam politik demokrasi di Indonesia.